

ANALISIS FAKTOR ATP (*ABILITY TO PAY*) DAN WTP (*WILLINGNESS TO PAY*) DALAM MEMBAYAR IURAN BPJS MANDIRI DI RSP IBNU SINA MAKASSAR

Farah Zhafirah Sudirman^{1*}, A. Rizki Amelia², Hasriwiani Habo Abbas³, Yusriani⁴, Muhammad Ikhtiar⁵, Nurmiati Muchlis⁶

Magister Kesehatan Masyarakat, Universitas Muslim Indonesia^{1,2,3,4,5,6}

*Corresponding Author : farahzhafirah74@gmail.com

ABSTRAK

Program BPJS Kesehatan merupakan bagian dari sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang bertujuan memberikan akses layanan kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat Indonesia. Namun demikian, tingkat partisipasi peserta mandiri (Pekerja Bukan Penerima Upah) dalam membayar iuran masih tergolong rendah, yang diduga dipengaruhi oleh kemampuan dan kemauan peserta dalam memenuhi kewajiban finansial tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan Ability to Pay (ATP) dan Willingness to Pay (WTP) dalam membayar iuran BPJS Kesehatan peserta mandiri di Rumah Sakit Pendidikan (RSP) Ibnu Sina Makassar. Penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan desain deskriptif, untuk mengetahui faktor ATP dan WTP peserta BPJS Mandiri dalam membayar iuran di RSP Ibnu Sina Makassar berdasarkan tingkat pendapatan, tabungan kesehatan, jumlah anggota keluarga, tingkat pengetahuan, dan tingkat kepuasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendapatan memiliki pengaruh signifikan terhadap ATP, di mana peserta dengan pendapatan tinggi mayoritas mampu membayar iuran, sedangkan peserta berpendapatan rendah lebih banyak yang tidak mampu membayar. Tabungan kesehatan berasosiasi positif dengan ATP, di mana kepemilikan tabungan yang memadai meningkatkan kemampuan membayar. Jumlah anggota keluarga memengaruhi ATP, di mana keluarga dengan jumlah anggota kecil cenderung memiliki kemampuan membayar lebih baik dibandingkan keluarga besar. Tingkat pengetahuan tentang BPJS Kesehatan berpengaruh terhadap WTP, di mana pengetahuan yang baik mendorong kesediaan membayar. Kepuasan terhadap pelayanan BPJS Kesehatan juga memengaruhi WTP, dengan peserta yang merasa puas menunjukkan tingkat kesediaan membayar yang lebih tinggi.

Kata kunci : *ability to pay*, BPJS mandiri, faktor sosioekonomi, kepuasan peserta *willingness to pay*,

ABSTRACT

The BPJS Health program is part of the National Health Insurance (JKN) system aimed at providing equitable and fair access to healthcare services for all Indonesians. However, participation among independent members (Non-Wage Recipients) in paying contributions remains low, which is suspected to be influenced by participants' ability and willingness to fulfill their financial obligations. This study aims to analyze the factors associated with the Ability to Pay (ATP) and Willingness to Pay (WTP) health insurance contributions among independent BPJS participants at Ibnu Sina Teaching Hospital in Makassar. This research employed a quantitative approach with a descriptive design to examine the ATP and WTP factors of BPJS Mandiri participants in paying contributions at RSP Ibnu Sina Makassar, based on income level, health savings, number of family members, level of knowledge, and level of satisfaction. The results showed that income level had a significant effect on ATP, with high-income participants being more likely to afford the contributions, while low-income participants were more likely to be unable to pay. Health savings were positively associated with ATP, where sufficient health savings increased the ability to pay. The number of family members influenced ATP, with smaller families tending to have a better ability to pay compared to larger families. Knowledge about BPJS Kesehatan affected WTP, as good knowledge encouraged a greater willingness to pay. Satisfaction with BPJS Kesehatan services also affected WTP, with satisfied participants showing a higher willingness to pay.

Keywords : *ability to pay*, *willingness to pay*, *independent bpjs participants*, *socioeconomic factors*, *service satisfaction*

PENDAHULUAN

Program BPJS Kesehatan merupakan penyelenggara program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang mulai diimplementasikan di Indonesia sejak 1 Januari 2014 sebagai bagian dari sistem jaminan sosial nasional yang bertujuan memberikan perlindungan kesehatan kepada seluruh masyarakat. Program ini diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 dan merupakan transformasi dari PT Askes (Baso dkk., 2021). Prinsip utama JKN adalah pemerataan akses terhadap layanan kesehatan yang layak bagi seluruh warga negara Indonesia. Dalam pelaksanaannya, keberhasilan program ini sangat bergantung pada partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat, termasuk dari kalangan pekerja sektor informal yang masuk dalam kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPUP) atau peserta mandiri. Namun, keterlibatan peserta mandiri dalam program BPJS masih tergolong rendah. Data BPJS Kesehatan tahun 2016 menunjukkan bahwa dari total penduduk Indonesia, hanya sekitar 7% yang berasal dari kelompok pekerja informal, padahal jumlah pekerja informal mencapai hampir 58% dari total angkatan kerja. Permasalahan ini diperparah oleh ketidakpuasan terhadap pelayanan BPJS, sistem rujukan yang membatasi pilihan fasilitas kesehatan, antrean yang panjang, serta kewajiban mendaftarkan seluruh anggota keluarga yang dinilai membebani secara finansial (Winda & Widodo, 2021).

Selain itu, masyarakat berpenghasilan rendah sering kali merasa keberatan dengan besarnya iuran yang harus dibayarkan setiap bulan, terutama dalam kondisi pendapatan yang tidak tetap atau di bawah Rp1.000.000 per rumah tangga. Faktor pendidikan dan minimnya informasi mengenai prosedur pendaftaran dan manfaat program BPJS juga turut menjadi penghambat (Harlinisari, 2021). Dari sisi pendanaan, studi sebelumnya menunjukkan bahwa lebih dari 70% pembiayaan kesehatan di Indonesia masih berasal dari pengeluaran pribadi masyarakat (out of pocket), yang menandakan bahwa belum semua masyarakat terlindungi oleh asuransi kesehatan (Hasbullah Thabran, 2012). Kemampuan Membayar (*Ability to Pay/ATP*) dan Kemauan Membayar (*Willingness to Pay/WTP*) menjadi indikator penting dalam menganalisis partisipasi masyarakat dalam program ini. Penelitian terdahulu melaporkan bahwa hanya sekitar 58,9% individu yang bersedia membayar iuran BPJS, dan adanya hubungan positif antara tingginya ATP terhadap WTP. Meskipun sistem iuran telah dirancang berdasarkan prinsip keadilan dan kemampuan finansial, permasalahan terkait keterjangkauan iuran masih sering terjadi, khususnya karena kebutuhan kesehatan bersifat tidak terduga dan biaya dapat menjadi beban mendadak bagi rumah tangga berpendapatan rendah (Indriani Syakhila dkk., 2021).

Beberapa penelitian mengidentifikasi bahwa faktor-faktor ekonomi seperti pendapatan keluarga, jumlah anggota keluarga, dan tabungan kesehatan berpengaruh terhadap ATP peserta (Hasbullah Thabran, 2012). Sementara itu, aspek non-ekonomi seperti pengetahuan mengenai program BPJS, pengalaman sebelumnya terhadap layanan kesehatan, serta tingkat kepuasan terhadap pelayanan BPJS turut memengaruhi WTP (Al Amir dkk., 2024). Sebuah studi di Kota Makassar menunjukkan bahwa meskipun 61% masyarakat tergolong mampu membayar, hanya sekitar 30% yang bersedia untuk membayar iuran BPJS secara rutin. Hal ini menggambarkan adanya kesenjangan antara kemampuan dan kemauan masyarakat dalam berpartisipasi aktif terhadap pembiayaan program JKN (Meta Novita dkk., 2022). Hingga tahun 2019, data di Kota Makassar menunjukkan bahwa dari 1.663.479 penduduk, hanya 1.286.925 jiwa yang terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, menyisakan sekitar 22,64% penduduk yang belum terdaftar (Dian Saputra Marzuki dkk., 2019). Angka ini mencerminkan tantangan serius dalam upaya mencapai *Universal Health Coverage* (UHC). Salah satu penyebab rendahnya kepatuhan peserta mandiri adalah kurangnya pemahaman mengenai kewajiban administrasi, termasuk pendaftaran seluruh anggota keluarga, serta pengetahuan terbatas mengenai prosedur dan manfaat BPJS (Winda & Widodo, 2021).

Dalam perspektif Islam, konsep jaminan sosial, termasuk jaminan kesehatan, sejalan dengan prinsip ta'āwun (tolong-menolong dalam kebaikan) sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an (QS. Al-Māidah: 32) dan tujuan syariat (maqāshid syarī'ah) dalam menjaga jiwa (hifzh al-nafs). Program seperti BPJS Kesehatan dapat dipandang sebagai bentuk implementasi nilai-nilai kebersamaan dan solidaritas sosial, di mana masyarakat yang sehat membantu yang sakit melalui mekanisme gotong royong. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan *Ability to Pay* (ATP) dan *Willingness to Pay* (WTP) dalam membayar iuran BPJS Kesehatan peserta mandiri, khususnya di Rumah Sakit Pendidikan (RSP) Ibnu Sina Kota Makassar, dengan memperhatikan variabel seperti status pendapatan, tabungan kesehatan, jumlah anggota keluarga, serta kepuasan terhadap pelayanan BPJS Kesehatan.

METODE

Penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan desain deskriptif, untuk mengetahui faktor *Ability to Pay* (ATP) dan *Willingness to Pay* (WTP) peserta BPJS Mandiri dalam membayar iuran di RSP Ibnu Sina Makassar berdasarkan tingkat pendapatan, tabungan kesehatan, jumlah anggota keluarga, tingkat pengetahuan, dan tingkat kepuasan. Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Sakit Pendidikan (RSP) Ibnu Sina Makassar, dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut memiliki jumlah peserta BPJS Mandiri yang memadai serta ketersediaan data yang dibutuhkan untuk penelitian. Penelitian dilakukan selama satu bulan, yaitu pada bulan Mei tahun 2025. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pasien peserta BPJS Kesehatan Mandiri dari kelas 1, 2, dan 3 yang menjalani perawatan atau berkunjung ke RSP Ibnu Sina Makassar selama periode tersebut, dengan jumlah populasi sebanyak 600 orang.

Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Kriteria inklusi adalah pasien yang terdaftar sebagai peserta BPJS Mandiri, berusia di atas 15 tahun, dan bersedia menjadi responden. Sementara itu, kriteria eksklusi adalah pasien dengan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan atau memiliki asuransi kesehatan swasta. Penentuan jumlah sampel dilakukan dengan menggunakan rumus Slovin, dengan tingkat kesalahan 5%, sehingga diperoleh jumlah sampel sebanyak 240 orang. Variabel independen dalam penelitian ini meliputi tingkatan kepesertaan BPJS, tingkat pendapatan, biaya kesehatan, jumlah anggota keluarga, pengetahuan, dan kepuasan terhadap pelayanan. Variabel dependen adalah *Ability to Pay* (ATP) dan *Willingness to Pay* (WTP) untuk iuran jaminan kesehatan. Instrumen yang digunakan berupa kuesioner tertutup yang telah terstandarisasi dan divalidasi dari beberapa penelitian sebelumnya. Teknik analisis data dilakukan menggunakan bantuan perangkat lunak SPSS untuk mengetahui frekuensi dan persentase antar variabel.

HASIL

Analisis Univariat

Tabel 1. Karakteristik Responden

Variabel	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Status Keluarga		
Kepala RT (Ayah)	78	32,5
Istri	137	57,1
Anak	25	10,4
Jenis Kelamin		
Laki-laki	81	33,8
Perempuan	159	66,3

Usia		
15 -18 tahun	15	6,3
19 – 59 tahun	198	82,5
>60 tahun	27	11,3
Riwayat Pendidikan		
Tidak sekolah	2	0,8
Tidak tamat SD	5	2,1
Tamat SD/sederajat	26	10,8
Tamat SMP/sederajat	42	17,5
Tamat SMA/sederajat	75	31,3
Perguruan Tinggi	90	37,5
Kelas BPJS		
Kelas 1	21	8,8
Kelas 2	73	30,4
Kelas 3	146	60,8
Total	240	100,0

Berdasarkan tabel 1, didapatkan bahwa sebagian besar responden berjenis kelamin perempuan (66,3%), dengan mayoritas status keluarga sebagai istri (57,1%). Usia rata-rata responden adalah 39,6 tahun dengan kategori usia terbanyak pada usia dewasa 19-59 tahun (82,5%). Pendidikan responden didominasi oleh lulusan perguruan tinggi (37,5%) dan SMA/sederajat (31,3%).

Tabel 2. Pertanyaan Terbuka Terkait Pengeluaran dan Batas Maksimal Biaya Kesehatan yang Dikeluarkan Oleh Responden

Variabel	n	Rata-rata (SD)	Nilai	Nilai	n (%)	Rentang
			Terendah (n/%)	Tertinggi (n/%)		
Biaya Kesehatan yang dikeluarkan	240	208.000 (158.000)	Rp20.000 (3 orang / 1,25%)	Rp750.000 (2 orang / 0,8%)	3 (1,25%)	20.000
Biaya Kesehatan yang maksimal dikeluarkan	240	254.000 (230.000)	Rp20.000 (1 orang / 0,4%)	Rp1.000.000 (10 orang / 4,2%)	1 (0,4%)	20.000

Berdasarkan tabel 2, rata-rata biaya kesehatan yang dikeluarkan responden adalah Rp208.000 dengan simpangan baku Rp158.000, dan rata-rata biaya maksimal yang bersedia dikeluarkan sebesar Rp254.000 dengan simpangan baku Rp230.000. Rentang pengeluaran bervariasi dari Rp20.000 hingga Rp1.000.000, menunjukkan perbedaan kemampuan dan preferensi responden dalam membiayai layanan kesehatan.

Tabel 3. Kesesuaian Kelas BPJS berdasarkan Kesangguapan Peserta Dalam Membayar BPJS Mandiri

Kategori BPJS Mandiri	Kelas	Mean (Min-Max)	Sesuai		Tidak Sesuai	
			n	%	n	%
Kelas 1		150.000 (150.000)	21	100,	0	0,0
Kelas 2		96.360 (60.000 - 100.000)	66	90,5	7	9,5
Kelas 3		35.732 (10.000 - 145.000)	46	31,5	100	68,5

Berdasarkan tabel 3, menunjukkan bahwa seluruh responden pada kelas 1 (100%) menyatakan iuran sebesar Rp150.000 sesuai dengan kemampuan membayar mereka. Pada kelas 2, sebanyak 90,5% responden menyatakan iuran sebesar Rp60.000–Rp100.000 masih sesuai, sedangkan 9,5% menyatakan tidak sesuai. Sebaliknya, pada kelas 3 hanya 31,5% yang menyatakan kesesuaian iuran (Rp10.000–Rp145.000), sementara mayoritas (68,5%)

menyatakan tidak sesuai. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun kelas 3 diperuntukkan bagi kelompok berpenghasilan rendah, sebagian besar responden tetap merasa terbebani secara finansial. Sebaliknya, tingkat kesesuaian iuran lebih tinggi ditemukan pada kelas 1 dan 2, yang menunjukkan adanya pengaruh kemampuan ekonomi dan persepsi terhadap manfaat layanan terhadap penilaian kesesuaian pembayaran.

Tabel 4. Kesesuaian Tingkat Pendapatan Peserta BPJS Mandiri terhadap ATP (Ability to Pay)

Variabel	ATP (Ability to Pay)			
	Mampu		Tidak Mampu	
Tingkat Pendapatan	n	%	n	%
Tinggi	139	57,9	6	2,5
Rendah	81	33,8	14	5,8
Total	220	91,7	20	8,3

Berdasarkan tabel 4, didapatkan bahwa responden dengan pendapatan tinggi lebih banyak yang mampu membayar iuran BPJS Mandiri (57,9%) dibandingkan dengan yang tidak mampu (2,5%). Sebaliknya, pada responden berpendapatan rendah, persentase yang tidak mampu membayar lebih tinggi (5,8%)

Tabel 5. Kesesuaian Tabungan Kesehatan Peserta BPJS Mandiri terhadap ATP (Ability to Pay)

Variabel	ATP (Ability to Pay)			
	Mampu		Tidak Mampu	
Tabungan Kesehatan	n	%	n	%
Cukup	179	74,6	14	5,8
Tidak cukup	41	17,1	6	2,5
Total	220	91,7	20	8,3

Berdasarkan tabel 6, didapatkan bahwa responden yang memiliki tabungan kesehatan yang cukup lebih banyak yang mampu membayar iuran BPJS (74,6%) dibandingkan yang tidak cukup (17,1%).

Tabel 7. Kesesuaian Anggota Keluarga Peserta BPJS Mandiri terhadap ATP (Ability to Pay)

Variabel	ATP (Ability to Pay)			
	Mampu		Tidak Mampu	
Anggota Keluarga	n	%	n	%
Kecil	167	69,6	11	4,6
Besar	53	22,1	9	3,8
Total	220	91,7	20	8,3

Berdasarkan tabel 7, responden dengan jumlah anggota keluarga kecil lebih banyak yang mampu membayar (69,6%) dibandingkan dengan keluarga besar (22,1%).

Tabel 8. Kesesuaian WTP (Willing to Pay) Peserta BPJS Mandiri terhadap Pengetahuan terhadap BPJS Mandiri

Variabel	WTP (Willing to Pay)			
	Mau		Tidak mau	
Tingkat Pengetahuan	n	%	n	%
Baik	152	63,3	4	1,7
Kurang baik	63	26,3	21	8,8
Total	215	89,6	25	10,4

Berdasarkan tabel 8, bahwa responden dengan pengetahuan baik lebih banyak yang bersedia membayar (63,3%) dibandingkan dengan yang tidak mau membayar (1,7%). Sebaliknya, responden dengan pengetahuan kurang baik lebih banyak yang tidak bersedia membayar (8,8%)

Tabel 9. Kesesuaian WTP (Willing to Pay) peserta BPJS Mandiri terhadap Tingkat Kepuasan

Variabel Tingkat Kepuasan	WTP (Willing to Pay)			
	Mau		Tidak mau	
	n	%	n	%
Puas	81	33,8	48	20,0
Kurang puas	21	8,8	90	37,5
Total	102	42,5	138	57,5

Berdasarkan tabel 9, responden yang puas lebih banyak yang bersedia membayar (33,8%), sedangkan responden yang tidak puas lebih banyak tidak bersedia membayar (37,5%).

PEMBAHASAN

Kesesuaian Tingkat Pendapatan terhadap ATP dan Kesesuaian Pembayaran Tingkat

Pendapatan merupakan faktor yang sangat menentukan dalam sistem jaminan kesehatan nasional. Menurut (Santoso dkk., 2024), keterbatasan ekonomi dapat memengaruhi akses terhadap layanan kesehatan yang layak dan memadai, terutama bagi peserta mandiri BPJS. Temuan ini selaras dengan teori Determinan Sosial Kesehatan dari (Buzelli dkk., 2022), yang menekankan bahwa faktor sosial-ekonomi, seperti pendapatan, menjadi determinan utama dalam akses, kualitas, dan utilisasi layanan kesehatan. Individu dengan pendapatan tinggi cenderung memiliki fleksibilitas dalam memilih jenis layanan kesehatan dan lebih mampu menyesuaikan dengan besaran iuran yang dikenakan, dibandingkan dengan individu berpendapatan rendah yang menghadapi hambatan struktural dan finansial. Selain itu, (Podlipnik & Koritnik, 2017) menambahkan bahwa peserta dengan kondisi ekonomi yang mapan lebih mungkin menjaga kontinuitas kepesertaan karena stabilitas dalam membayar iuran.

Kesesuaian Tabungan Kesehatan terhadap ATP dan Kesesuaian Pembayaran.

Ketersediaan tabungan kesehatan memiliki peran penting dalam mendukung kemampuan peserta membayar iuran. (Marzuki dkk., 2019) menunjukkan bahwa kemampuan membayar program JKN secara umum meningkat seiring dengan kepemilikan cadangan dana untuk kesehatan. (Abdillah Ramadhan dkk., 2015) juga menegaskan bahwa tabungan menjadi instrumen mitigasi risiko keuangan, terutama dalam sistem kesehatan berbasis iuran mandiri. Maharani dan Wardhani (2020) menyatakan bahwa individu yang memiliki tabungan kesehatan cenderung memiliki respons keuangan yang lebih adaptif terhadap biaya kesehatan tak terduga (Utami dkk., 2020). Namun, (Yandrizal dkk., 2016) menyoroti bahwa masih banyak peserta yang belum mampu menyiapkan dana kesehatan, menandakan adanya kesenjangan dalam literasi dan perencanaan keuangan kesehatan. (Podlipnik & Koritnik, 2017) menggarisbawahi bahwa tabungan berperan sebagai jaring pengaman yang memungkinkan individu bertahan dalam skema iuran yang bersifat tetap maupun fluktuatif.

Kesesuaian Jumlah Anggota Keluarga terhadap ATP dan Kesesuaian Pembayaran

Jumlah anggota keluarga turut memengaruhi tekanan keuangan rumah tangga, yang berdampak pada alokasi anggaran untuk pembayaran iuran BPJS. (Michael Marmot dkk., 2020) menunjukkan bahwa semakin besar ukuran keluarga, maka beban ekonomi cenderung

meningkat, sehingga mengurangi kemampuan finansial per individu dalam rumah tangga tersebut. (Shimamura dkk., 2018) menyatakan bahwa keluarga kecil lebih efisien dalam manajemen pengeluaran, termasuk dalam pengalokasian dana untuk iuran kesehatan. Hal ini sejalan dengan pandangan (Elena Astrilia dkk., 2021), yang menekankan bahwa tekanan finansial dalam keluarga besar dapat menurunkan prioritas terhadap pembiayaan jaminan kesehatan. Meskipun demikian, (Arni Rizqiani R dkk., 2022) menyatakan bahwa dalam beberapa konteks, hubungan antara jumlah anggota keluarga dan ATP tidak selalu signifikan, tergantung pada distribusi pendapatan dan struktur pengeluaran rumah tangga.

Kesesuaian Tingkat Pengetahuan terhadap WTP dan Kesesuaian Pembayaran

Pengetahuan peserta mengenai BPJS dan manfaatnya memengaruhi persepsi serta keputusan dalam membayar iuran secara mandiri. (Harms & Linton, 2016) menemukan bahwa konsumen yang memiliki pemahaman lebih tinggi tentang suatu program cenderung memiliki willingness to pay yang lebih baik. Cordell dalam (Handayani dkk., 2020) menggarisbawahi bahwa pengetahuan konsumen dapat membentuk sikap terhadap manfaat layanan dan menumbuhkan nilai terhadap biaya yang dibayarkan. Teori perilaku kesehatan (Phillips dkk., 2013) mendukung pandangan ini dengan menyatakan bahwa pemahaman yang baik terhadap sistem kesehatan meningkatkan kepatuhan dalam pembayaran dan pemanfaatan layanan. (Konuk, 2019) juga mengungkapkan bahwa peningkatan pengetahuan dapat memperhalus persepsi harga terhadap nilai layanan, sehingga memengaruhi kesediaan membayar dalam sistem jaminan sosial.

Kesesuaian Tingkat Kepuasan terhadap WTP dan Kesesuaian Pembayaran.

Kepuasan peserta terhadap pelayanan sangat berkaitan dengan kesediaan untuk membayar iuran. Penelitian oleh (Wirya dkk., 2019) menunjukkan bahwa kualitas layanan memiliki pengaruh positif terhadap willingness to pay. (Miranda-de la Lama dkk., 2019) menyatakan bahwa persepsi peserta terhadap manfaat layanan menentukan apakah iuran dianggap layak dibayar. Ketika peserta merasa puas dengan pelayanan yang diterima, mereka cenderung menganggap biaya yang dikeluarkan sebanding dengan kualitas dan manfaat yang diperoleh. Namun, penelitian (Mentari, 2022) mengindikasikan bahwa prosedur layanan yang dianggap rumit dapat menjadi penghalang dalam meningkatkan WTP, bahkan jika peserta secara finansial mampu. Oleh karena itu, kepuasan tidak hanya dipengaruhi oleh hasil layanan, tetapi juga proses pelayanan itu sendiri, yang harus diperbaiki secara sistemik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap peserta BPJS Mandiri di RSP Ibnu Sina Makassar, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor sosioekonomi dan persepsi layanan memiliki pengaruh yang nyata terhadap kemampuan membayar (Ability to Pay/ATP) dan kesediaan membayar (Willingness to Pay/WTP) iuran BPJS Mandiri. Tingkat pendapatan menjadi faktor penting dalam ATP, di mana peserta berpendapatan tinggi mayoritas mampu membayar, sedangkan berpendapatan rendah cenderung lebih banyak yang tidak mampu. Tabungan kesehatan yang memadai juga mendukung ATP, karena peserta dengan tabungan cukup lebih dominan mampu membayar dibandingkan yang tidak cukup. Jumlah anggota keluarga turut memengaruhi ATP, di mana keluarga kecil lebih mampu membayar dibandingkan keluarga besar dengan beban pengeluaran lebih tinggi. Sementara itu, pada aspek WTP, tingkat pengetahuan yang baik tentang BPJS Kesehatan mendorong peserta untuk lebih bersedia membayar iuran, sedangkan pengetahuan yang kurang baik menurunkan kesediaan tersebut. Tingkat kepuasan terhadap pelayanan BPJS Kesehatan juga menjadi penentu WTP, di mana peserta yang puas lebih cenderung membayar, sedangkan ketidakpuasan menurunkan komitmen membayar. Dari hasil

ini, pendapatan, tabungan kesehatan, jumlah anggota keluarga, pengetahuan, dan kepuasan pelayanan semuanya berkontribusi penting dalam membentuk kemampuan dan kemauan peserta untuk membayar iuran BPJS Mandiri secara berkelanjutan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Peneliti menyampaikan terimakasih atas dukungan, inspirasi dan bantuan kepada semua pihak dalam membantu peneliti menyelesaikan penelitian ini, termasuk pada peserta yang telah bersedia berpartisipasi dalam penelitian hingga selesai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah Ramadhan, A., Reza Rahmadi, A., & Djuhaeni, H. (2015). *Ability and Willingness to Pay Premium in the Framework of National Health Insurance System*. Dalam *Althea Medical Journal* (Vol. 2, Nomor 4). <http://www>.
- Al Amir, U., Muchlis, N., & Habo Abbas, H. (2024). Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Perilaku Terhadap Kesehatan Gigi dan Mulut Pasien Poliklinik Gigi RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar Tahun 2024. *Journal of Aafiyah Health Research (JAHR)* 2024, 5(2), 153–163. <https://doi.org/10.52103/jahr.v5i2.1675>
- Arni Rizqiani R, Nurgahayu, & Natasya F M. (2022). Faktor Yang Berhubungan Dengan ATP Dan WTP Dalam Membayar Iuran Bpjs Kesehatan Mandiri. *Window of Public Health Journal*, 3(4), 750–760.
- Baso, A. A., Aripa, L., & Wijaya, I. (2021). Ability To Pay (ATP) And Willingness To Pay (WTP) *The Premium of BPJS Kesehatan Mandiri in The Working Area Of Cendrawasih Health Center*, Makassar City. *Pancasakti Journal Of Public Health Science And Research*, 1(1), 7–12. <https://doi.org/10.47650/pjphsr.v1i1.202>
- Buzelli, M. L., Dunn, P., Scott, S., Gottlieb, L., & Alderwick, H. (2022). *A framework for NHS action on social determinants of health*. The Health Foundation.
- Damayanti, R. (2010). Analisis Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kemampuan dan Kemauan Membayar Pasien Membayar Biaya Rawat Inap Kelas III RSU Muhammadiyah Kudus. Respiratory Universitas Diponegoro.
- Dian Saputra Marzuki, Muh Yusri Abadi, Darmawansyah Darmawansyah, Muhammad Alwy Arifin, Suci Rahmadani, & Muhammad Al Fajrin. (2019). Analisis Kemampuan Membayar dan Kemauan Membayar Peserta PBPU yang Menunggak Iuran JKN Di Kecamatan Tamalate Kota Makassar. *Jurnal Manajemen Kesehatan Yayasan RS.Dr. Soetomo*, 5(2).
- Elena Astrilia, F., Harjono Hadiwiardjo, Y., & Soeryo, G. (2021). *Factors Affecting Willingness to Pay for Outpatient Services at RSU Tangerang Selatan*. *Public Health Journal*, 15(1), 14–18.
- Handayani, F., Putri Ahmadi, A., Putri Zalma, S., Ulandari, A., & Suhud, U. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Willingness to Pay Pada Pelanggan Restoran Pizza. *Jurnal Bisnis, Manajemen, dan Keuangan*, 1(1).
- Harlinisari, R. (2021). Analisis Penyebab Rendahnya Kepersertaan Mandiri Pada Program Jaminan Kesehatan Nasional. *Jurnal Human Care*, 6, 120–129.
- Harms, R., & Linton, J. D. (2016). *Willingness to Pay for Eco-Certified Refurbished Products: The Effects of Environmental Attitudes and Knowledge*. *Journal of Industrial Ecology*, 20(4), 893–904. <https://doi.org/10.1111/jiec.12301>
- Hasbullah Thabrany. (2012). Tinjauan Akademis Tentang Asuransi Kesehatan Nasional. Laporan Studi. Jakarta. Pusat Kajian Ekonomi Kesehatan UI.

- Indriani Syakhila, Nurgahayu, & Ulfa Sulaeman. (2021). Faktor Yang Berhubungan Dengan ATP Dan WTP Dengan Penentuan Keputusan Kelas Iuran Bpjs Kesehatan. *Window of Public Health Journal*, 2(1).
- Konuk, F. A. (2019). *Consumers' willingness to buy and willingness to pay for fair trade food: The influence of consciousness for fair consumption, environmental concern, trust and innovativeness*. *Food Research International*, 120, 141–147. <https://doi.org/10.1016/j.foodres.2019.02.018>
- Marzuki, D. S., Abadi, Muh. Y., Darmawansyah, Arifin, M. A., Rahmadani, S., & FajrinM, M. Al. (2019). *Analysis on the Ability to Pay and Willingness to Pay of PBPU JKN Participants in Tamalate Sub-District, Makassar City*. *Jurnal Manajemen Kesehatan Yayasan RS. Dr. Soetomo*, 5(2).
- Mentari, W. D. (2022). *The Relationship between Ability to Pay and Willingness to Pay With the Compliance Program Paying the National Health Insurance Contribution*. *Arkesmas*, 7(2).
- Meta Novita, Sri Handayani, Ika Yulia Darma, & Edison. (2022). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kepatuhan Membayar Iuran Bpjs Kesehatan Mandiri Pada Pasien Rawat Jalan Di Puskesmas Lubuk Basung Kab. Agam. *Jurnal Kesehatan Medika Saintika*, 13(1).
- Michael Marmot, Jessica Allen, Tammy Boyce, Peter Goldblatt, & Joana Morrison. (2020). *Health Equity in England: The Marmot Review ten years on*. London: Institute of Health Equity.
- Miranda-de la Lama, G. C., Estévez-Moreno, L. X., Villarroel, M., Rayas-Amor, A. A., María, G. A., & Sepúlveda, W. S. (2019). *Consumer Attitudes Toward Animal Welfare-Friendly Products and Willingness to Pay: Exploration of Mexican Market Segments*. *Journal of Applied Animal Welfare Science*, 22(1), 13–25. <https://doi.org/10.1080/10888705.2018.1456925>
- Nainggolan, V., & Herning Sitabuana, T. (2022). Jaminan Kesehatan Bagi Rakyat Indonesia Menurut Hukum Kesehatan. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, 1(6), 907–916. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i6.109>
- Notoatmodjo, S. (2012). Promosi Kesehatan & Ilmu Perilaku. Rineka Cipta.
- Phillips, W. M. J., Asperin, A., & Wolfe, K. (2013). *Investigating the effect of country image and subjective knowledge on attitudes and behaviors: U.S. Upper Midwesterners' intentions to consume Korean Food and visit Korea*. *International Journal of Hospitality Management*, 32(1), 49–58. <https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2012.04.003>
- Podlipnik, J., & Koritnik, B. (2017). *The Ability-to-Pay Principle as a Primarily Constitutional Basis for Tax Norms of a Financial Nature*. *Principle-Based Ethics*. <https://www.researchgate.net/publication/319955126>
- Pungky A.P.P, & Puspitasari B.N. (2014). Penataan Ulang Program BPJS Kesehatan dengan Penggunaan CHAT Eksperimen dan Memperhatikan Kesediaan Membayar (Willingness to Pay) Masyarakat terhadap Iuran Jaminan Kesehatan. *Universitas Diponegoro Repository*.
- Riska Ananda, Fhidiana Sari, & Fitriani Pramita Gurning. (2025). Hubungan Ability To Pay dan Willingness To Pay dengan Kepatuhan Membayar Iuran Peserta BPJS Non PBI di Kecamatan Batang Kuis. *Jurnal Ilmiah Kedokteran dan Kesehatan*, 4(3), 140–152. <https://doi.org/10.55606/klinik.v4i3.4476>
- Santoso, B., Rafiq, A., & Kacung, S. (2024). Implementasi Metode AHP dan SMART untuk Penentuan Keputusan Calon Penerima Zakat Produktif. *MALCOM: Indonesian Journal of Machine Learning and Computer Science*, 4(3), 1087–1095. <https://doi.org/10.57152/malcom.v4i3.1504>

- Sarah Thomson, Jonathan Cylus, & Tamás Evetovits. (2019). *Can people afford to pay for health care?* Dalam WHO Barcelona Office for Health Systems Strengthening (WHO). WHO Barcelona Office for Health Systems Strengthening. <http://apps.who.int/bookorders>.
- Shimamura, Y., Matsushima, M., Yamada, H., & Nguyen, M. T. (2018). *Willingness-to-Pay for Family-Based Health Insurance: Findings From Household And Health Facility Surveys in Central Vietnam.* *Global Journal of Health Science*, 10(7), 24. <https://doi.org/10.5539/gjhs.v10n7p24>
- Utami, S. P., Hadiwiardjo, Y. H., & Simanjuntak, K. (2020). *The Relationship Of Ability To Pay And Ownership Of Health Insurance Towards Willingness To Pay Laboratory Services At Persahabatan Hospital, East Jakarta.* *The 7th International Conference on Public Health*, 1–8. <https://doi.org/10.26911/the7thicph-FP.04.01>
- Winda, N. W. A., & Widodo, S. (2021). Pelayanan Kesehatan, Pemilihan Kelas Perawatan dan Sanksi Layanan dengan Kemauan Membayar Premi (Willingness To Pay) Peserta Mandiri (PBPU). *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 2(2), 163–171. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jppkmi> URL: <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jppkmi/article/view/52428>
- Wirya, H., Top, C., & Abdulla, N. (2019). *Service quality among Kurdistan hotels.* *International Journal of Economics, Commerce and Management*, 6(7). <http://ijecm.co.uk/>
- Yandrizal, Rifa'i, & Selpa Putri Utami. (2016). Analisis Kemampuan Dan Kemauan Membayar Iuran Terhadap Pencapaian UHC Jkn Di Kota Bengkulu. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, 2.